

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Perumusan kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru berjalan dengan dinamika yang normatif. Perumusan kebijakan dilakukan dengan menganalisis kebutuhan, sejarah, sosial budaya, dan pola kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi syariat Islam. Penyusunan perumusan kebijakan dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi yang dinamis antara kepala sekolah, guru, dan *stakeholders* dengan lingkungannya. Kepala sekolah berperan sebagai *leader* dan komunikator yang lebih mementingkan hasil musyawarah. Model perumusan kebijakan ini disebut dengan model pengamatan terpadu (*mixed-scanning*) atas keputusan pokok dan tambahan serta menetapkan proses formulasi kebijakan sebagai pedoman dengan memperhatikan kriteria nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan kepentingan masyarakat.
2. Implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru dilakukan melalui tahapan: penunjukan tim implementor, melakukan pelatihan dan pembinaan guru, dan sosialisasi kebijakan sekolah. Perwujudan budaya sekolah Islami terlihat dari **nilai keunggulan**, yaitu program unggulan Tahfizh Al Qur'an dan program peningkatan kapasitas guru. **Nilai ibadah** dengan membaca Al Qur'an tiap pagi secara bersama-sama, shalat dhuhur dan ashar berjamaah, Yasinan, thaushiah, dzikir, berpakaian sesuai syariat Islam, silaturahmi melalui Senyum, Sapa, Salam, tabungan amal jariyah, bimbingan keagamaan secara berkala, peringatan hari-

hari besar Islam, dan menerapkan nilai-nilai Islami dalam bekerja (dedikasi, profesional, amanah, ikhlas). **Nilai kedisiplinan**, melaksanakan dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu, melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sekolah, tekun dalam bekerja dan menghargai waktu. **Nilai tanggungjawab** dengan mengamalkan prinsip-prinsip ajaran Islam (*Habluminallah wa Habluminannas*), bekerja sama dalam hal kebaikan, komitmen, integritas, toleransi, dan menyadari hak dan kewajiban. Model implementasi yang digunakan berupa kombinasi antara komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi dengan isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

3. Evaluasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru dilakukan secara internal dan eksternal. Kedua sekolah menggunakan model evaluasi tipe hasil dan tipe evaluasi proses. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh kepala sekolah yang memiliki kewenangan kolegial untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap kebijakan. Secara eksternal kewenangan evaluasi bersifat administratif di bawah Dinas Pendidikan Aceh. Namun sistem evaluasi yang dilaksanakan oleh SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen lebih terukur dan jelas, karena kinerja profesional guru terekam pada Sistem Informasi Sekolah Terpadu Online (SISTO).
4. Secara empirik, implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan sekolah yaitu: 1) internalisasi nilai-nilai Islam dalam budaya sekolah; 2) kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami; 3) mengamalkan budaya kerja Islami; dan 4) pengembangan kinerja profesional guru secara berkelanjutan. Model rekomendasi (*recommended model*) dapat dijadikan model alternatif bagi pemerintah Aceh pada umumnya dan sekolah pada khususnya dalam

mendorong terlaksananya budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru yang bersifat *continuous improvement* yaitu usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki Qanun penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif, efisien dan profesional.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini menemukan beberapa teori berdasarkan pada substansi masalah yang diangkat. Ada dua tipologi lembaga pendidikan, yaitu sekolah yang memiliki ketaatan dengan seluruh kebijakan pemerintah daerah yang diwakili sekolah negeri dan sekolah yang memiliki fleksibilitas terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diwakili oleh sekolah swasta. Penelitian ini memperoleh temuan-temuan sebagai berikut:

1. Implikasi teoretik

- 1) Agar implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islami di Aceh berjalan dengan baik, maka sekolah umum membutuhkan tahapan-tahapan dalam menyikapi dan menerima kebijakan yang diawali dengan sebuah perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Temuan ini menguatkan teori perumusan kebijakan yang dikemukakan Dunn (1981), dimana sebuah perumusan kebijakan dilakukan dengan tahapan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
- 2) Implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru akan terlaksana dengan baik jika terdapat kepala

sekolah yang memiliki visi dan berperan sebagai *leader* dan komunikator. Temuan penelitian ini meneguhkan pandangan Sallis (1993) tentang seorang pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya harus memiliki visi dan dapat memindahkannya ke dalam kebijakan-kebijakan yang jelas dan tujuan khusus sekolah.

- 3) Kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru mampu menjadi *brand* sekolah melalui program unggulan, *leadership* dan membangun citra sekolah umum sebagai menjadi lembaga pendidikan yang bercirikan Islam. Temuan penelitian ini menguatkan pendapat Muhaimin (2011) yang menyebutkan bahwa untuk menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan dengan mengembangkan program-program unggulan, memperkuat *leadership*, dan membangun pencitraan.
- 4) Sekolah swasta mempunyai langkah yang lebih maju dalam program-program pengembangan kinerja profesional guru karena tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan dari Pemerintah. Sedangkan sekolah Negeri lebih berfokus pada program-program pembentukan karakter siswa.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi yayasan dan kepala sekolah yang telah melaksanakan implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

5.3 Saran

1. Guru ikut berperan aktif dalam menyukseskan kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru.
2. Guru dapat melakukan pengembangan kinerja profesional guru dengan membangun komunitas pembelajar melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
3. Menyiapkan kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan religius dan visioner dalam rangka implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru.
4. Melakukan inovasi secara terus menerus dalam menyikapi dan mengadaptasikan perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islami yang dilakukan oleh pemerintah Aceh.
5. Penelitian ini dilakukan pada subjek dan objek penelitian yang terbatas. Sifat penelitian adalah kasuistik, sehingga tidak bisa digeneralisasikan dengan diberlakukan pada semua objek penelitian. Dari sisi objek penelitian dilakukan pada dua Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen, tentunya belum bisa mewakili seluruh Sekolah Menengah Atas. Sedangkan dari sisi fokus penelitian masih sebatas pada ranah implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru.
6. Peneliti menyadari akan keterbatasan, karena belum menyentuh pada aspek sosial, ekonomi, dan politik secara mendalam. Harapan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah dengan mengkaji pada aspek sosial, ekonomi, dan politik terhadap kebijakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Hasil penelitian ini tentu hanya bisa dilaksanakan atau diberlakukan pada wilayah yang memiliki kesamaan atau kemiripan objek penelitian dengan mempertimbangkan prinsip *transferability*. Diharapkan terbukanya penelitian lain tentang implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru dalam perspektif yang berbeda.

5.4 Dalil

Meskipun lokus dan fokus masalah penelitian berada pada dua sekolah yaitu SMA Negeri 1 Bireuen dan SMA Swasta Sukma Bangsa Bireuen, namun temuan penelitian ini dapat juga diberlakukan di SMA yang ada di Propinsi Aceh mempertimbangkan prinsip *transferability*. Berdasarkan proposisi, kesimpulan, implikasi dan saran di atas, maka dalil-dalil hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan kepala sekolah yang religius dan visioner yang ditopang oleh guru yang memiliki *spirit* dan *expert* untuk terus tumbuh dan berkembang (*growth*) sesuai ajaran agama adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru.
2. Perwujudan budaya sekolah Islami ditentukan oleh nilai keunggulan, nilai ibadah, nilai kedisiplinan, dan nilai tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut kemudian tercermin dalam sikap dan perilaku jujur, cinta damai, peduli lingkungan, rendah hati, dan ikhlas.
3. Faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan kejelasan mekanisme kerja memungkinkan terwujudnya efektivitas implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru.

4. Kapasitas sekolah sebagai pelaksana kebijakan dengan didukung oleh ketersediaan dan kelengkapan *Standard Operational Procedure* (SOP) mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

Dalil-dalil yang dikemukakan, dapat dirumuskan dalam satu rumusan tunggal yang merupakan *novelty* penelitian ini yaitu:

Keberhasilan implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru tergantung pada **Sinergitas** peran kepala sekolah, guru, *stakeholders* dan masyarakat yang terintegrasi secara kolaboratif, **terkoordinasi** dan **tersinkronisasi** menjadi standar terwujudnya sekolah pembelajar guna terciptanya guru yang memiliki dedikasi dan keahlian, serta generasi Qur'ani dan berkarakter Islami yang *Rahmatan lil'alam*.

Istilah yang digunakan untuk menjelaskan "Sinergitas" menggunakan konsep Sinergi dari Covey (2004). Istilah ini merupakan kegiatan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar dan pada jumlah bagian perbagian. Sinergi merupakan suatu kerja sama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan antara anggota tim. Sinergi sebagai kemampuan dalam mewujudkan hasil menakjubkan seperti hal-hal atau alternatif baru yang dahulunya tidak ada. Jika dihubungkan dengan temuan penelitian pada implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru, dapat dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui pendekatan Sinergitas aktor kebijakan yang terkoordinasi dan tersinkronisasi, yaitu:

- (1) **Terkoordinasi** adalah proses menyatukan tujuan dan kegiatan dari unit kerja sekolah yang terpisah untuk mencapai tujuan, merupakan proses mengatur agar pembagian kerja dari berbagai kelompok tersusun menjadi satu kebutuhan terintegrasi yang dilakukan bersama oleh pihak yang berkepentingan yang bekerja sama dalam pengeimplementasian suatu kebijakan. Kemitraan yang harmonis antara kepala sekolah, guru, dan *stakeholders* untuk mempercepat pencapaian keberhasilan program sekolah. Sinergitas akan mudah terjadi apabila seluruh komponen-komponen sekolah yang ada mampu berkomitmen dan berpikir sinergi pada prinsip kebersamaan pandang dan saling menghargai.
- (2) **Tersinkronisasi** maksudnya adalah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing semua unsur yang terkait dalam menjalankan program-program Islami wajib menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi. Komunikasi dianggap sebagai mekanisme untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, perlu ada struktur dan jalur komunikasi yang tepat serta tata kerja yang sempurna. Sebagai syarat bagi kemajuan sekolah harus ditunjang oleh sistem komunikasi yang efektif. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang telah diciptakan.
- (3) Peneliti menawarkan indikator keberhasilan implementasi kebijakan budaya sekolah Islami dalam pengembangan kinerja profesional guru Sekolah Menengah Atas. Indikator tersebut adalah kepemimpinan kepala sekolah yang religius dan visioner serta guru *expert* dan *growth* sesuai ajaran agama. Temuan ini sesuai pandangan Engkoswara dan Komariah (2012) bahwa kepemimpinan visioner merupakan syarat kepemimpinan

di masa sekarang, dimana organisasi harus menampilkan kekuatan dan ciri khas budayanya menuju kualitas pendidikan yang diharapkan.

- (4) Guru telah mendalami ajaran agama Islam dan mengamalkannya dengan bekerja secara profesional untuk memperoleh hasil terbaik yang berorientasi pada nilai keimanan, perilaku dan ibadah. Profesi keguruan yang dimaknai bukan tidak berorientasi pada nilai material, tetapi lebih bertujuan sebagai niat beribadah kepada Allah swt. Temuan ini bertolak belakang dengan teori Shaw (1946) yang melontarkan tuduhan bahwa semua profesi merupakan persengkokolan melawan kaum awam. Kaum profesional berdiri sebagai tertuduh karena dianggap lebih menginginkan status dan kekayaan, bahkan memperdaya dan bukannya menolong klien-klien mereka (Koehn, 2000).